

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

Diah Tri Hermawati

hermawati_diah@uwks.ac.id

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun dokumen laporan Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016. Mendeskripsikan kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir (2011-2015), permasalahan dan dampaknya dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Deskriptif, yaitu analisa terhadap data yang bersifat kualitatif dari hasil diskusi kelompok terfokus. Analisa Kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang berupa pernyataan atau data yang tidak berupa angka. Analisa Kuantitatif, yaitu analisa terhadap data yang berupa angka-angka dan laporan yang berupa data kuantitatif dengan bantuan analisa statistik, untuk menghitung kecenderungan (*trend*), grafik dan diagram maupun prosentase (%).

Hasil Penelitian ini antara lain yaitu angka kemiskinan makro telah menurun sedikit dari 6,97 persen pada tahun 2011 menjadi 6,69 persen pada tahun 2013, atau sekitar 0,28 persen saja. Data mengenai jumlah nelayan masih terus diverifikasi sejak tahun 2014, dan telah tercatat 1.520 jiwa nelayan. Meskipun sedikit jumlahnya, kehidupan keluarga nelayan dan permasalahannya masih merupakan sumber kemiskinan yang sulit diatasi hingga saat ini. Strategi pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir harus didasarkan atas potensi yang dimiliki dan mengatasi secara spesifik permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara : a) membantu menurunkan biaya dan beban hidup keluarga miskin, b) meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga, baik dari hasil tangkapan ikan maupun pengolahan dan pemasaran ikan, c) memperbaiki perilaku keluarga miskin agar tidak konsumtif dan mau menabung untuk masa depannya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memerlukan peraturan pemerintah untuk menjabarkan dan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan Di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga melalui peraturan atau keputusan Bupati dapat disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berdampak langsung kepada peningkatan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir.

Kata kunci : Penanggulangan, Kemiskinan, Pesisir, Produktivitas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penetapan daerah sebagai wilayah pesisir, salah satunya didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah setempat. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 merupakan salah satu dasar mengenai kebijakan penetapan fungsi kawasan pesisir dan strategi penataan ruang wilayah salah satunya penetapan fungsi kawasan pesisir. Kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir menjelaskan bahwa arah pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sidoarjo diprioritaskan pada pengembangan potensi ekonomi pesisir, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mempertahankan fungsi kawasan.

Dalam pasal 24 ayat 3 dijelaskan bahwa yang termasuk dalam wilayah pesisir adalah di Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Jabon menjadi Sub Satuan Wilayah Pembangunan V dengan pusat pertumbuhan yang berada di wilayah Kecamatan Candi. Apabila, batasan wilayah pesisir tersebut disesuaikan dengan batasan bahwa wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai, maka daerah pesisir di Kabupaten Sidoarjo adalah Kecamatan Sidoarjo, Sedati, Buduran dan Jabon.

Kebijakan pengembangan kawasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu peran kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir tersebut sangat strategis dan harus terus ditingkatkan secara kuantitas dan kualitasnya. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif oleh pemerintah mengenai dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir yang telah dicapai selama ini. Sehingga dapat disusun kebijakan yang lebih tepat dalam kerangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Karakteristik masyarakat di wilayah pesisir berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah non pesisir. Hal ini merupakan akibat dari karakter mata pencaharian yang berbeda. Sebagian besar masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan dan mengusahakan tambak ikan. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan yang muncul dalam kehidupan masyarakat pesisir umumnya karena posisinya sebagai nelayan dan kurangnya infrastruktur pendukung di wilayah tersebut. Permasalahan kemiskinan di wilayah pesisir, bias dikatakan sebagai permasalahan para nelayan dan keluarganya.

Oleh karena itu, melalui kegiatan BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana) Kabupaten Sidoarjo ini, pemerintah daerah menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan kemiskinan yang ada, dapat disusun kebijakan dan program baru yang lebih sesuai dan mampu secara efektif dan efisien dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di wilayah pesisir.

Rumusan Permasalahan

Permasalahan dalam kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo, selama 5 tahun terakhir (2011-2015)?
2. Kebijakan dan program apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir?
3. Kebijakan dan program pemberdayaan apa yang paling tepat dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo?

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Menyusun dokumen laporan Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016.
2. Mendeskripsikan kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir (2011-2015), permasalahan dan dampaknya dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Manfaat kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya Laporan Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016.
2. Tersedianya informasi tentang capaian, dampak dan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo.
3. Sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dan sekaligus bahan perencanaan dan kebijakan dalam menentukan arah kebijakan program-program maupun kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan datang di lingkungan BPMPKB Kabupaten Sidoarjo

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup lokasi, data dan fasilitas penunjang kegiatan ini adalah :

1. Lokasi di seluruh Kecamatan dalam kategori wilayah pesisir di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Buduran, dan Jabon.
2. Mengumpulkan data-data penunjang Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015, berupa data sekunder yang diperoleh dari SKPD terkait.
3. Menganalisis data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo terutama yang dilaporkan atau dipublikasikan oleh pemerintah daerah.

METODOLOGI

Metode Penentuan Lokasi dan Sasaran

Lokasi kegiatan penyusunan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lokasi kegiatan difokuskan pada wilayah kecamatan yang berbatasan dengan laut atau wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Jabon. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pelaksana program penanggulangan kemiskinan, dan tokoh masyarakat disetiap kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penentuan Sampel Responden

Populasi data ditentukan secara keseluruhan adalah kecamatan yang berada atau berbatasan dengan wilayah pesisir yaitu kecamatan Sedati, Buduran, Candi dan Jabon. Sampel dipilih secara sengaja, purposive sampling dengan pertimbangan karakteristik kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo, yaitu di 10 desa pesisir.

Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam analisa ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Kedua jenis data tersebut berupa data-data sekunder berupa catatan, laporan, makalah dalam bentuk dokumen maupun data yang terdapat di kantor kecamatan dan dipublikasikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang program penanggulangan kemiskinan. Data yang digunakan adalah data runtut waktu selama 5 tahun terakhir (2011-2015). Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan metode :

- **Studi Pustaka**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka berupa catatan-catatan; dokumen-dokumen; dan literatur dari berbagai media baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan kondisi umum maupun spesifik Kabupaten Sidoarjo. Disamping itu metode ini juga dilakukan untuk mempelajari landasan hukum dan teori-teori yang akan dijadikan landasan penelitian dan mengumpulkan informasi serta referensi lainnya yang relevan.

- **Lokakarya atau Seminar,**

Guna penyempurnaan hasil analisa, maka dilakukan lokakarya atau seminar dengan peserta dari pihak internal Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari hasil analisis.

Metode Analisa Data

Teknik analisa yang dipergunakan sebagai berikut :

1. **Analisa Deskriptif**, yaitu analisa terhadap data yang bersifat kualitatif dari hasil diskusi kelompok terfokus.
2. **Analisa Kualitatif**, yaitu analisa terhadap data yang berupa pernyataan atau data yang tidak berupa angka.
3. **Analisa Kuantitatif**, yaitu analisa terhadap data yang berupa angka-angka dan laporan yang berupa data kuantitatif dengan bantuan analisa statistik, untuk menghitung kecenderungan (*trend*), grafik dan diagram maupun prosentase (%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kemiskinan Wilayah Pesisir

Kemiskinan masyarakat yang masih bertahan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah fenomena yang cukup mengherankan, mengingat potensi perikanan yang luar biasa di daerah ini. Kabupaten Sidoarjo yang terletak pada daerah Delta Brantas merupakan kabupaten terkecil di Jawa Timur dengan luas hanya 627 km². Kegiatan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menampilkan dua wajah. Di satu sisi sebagai kota industry dan UKM, dan di sisi lain identik dengan sentra tambak yang luasnya mencapai 15.530 hektar (5,28 km²) yang dimiliki oleh sekitar 3.300 petambak. Ikan bandeng dan udang merupakan komoditi

unggulan yang dijadikan lambang Kabupaten Sidoarjo. Beberapa kecamatan di Sidoarjo yang banyak memiliki lahan tambak antara lain Kecamatan Sidoarjo, Jabon, Buduran, Candi, Tanggulangin dan Sedati. Sekitar 90% petambak menerapkan metode pemeliharaan udang dengan teknik tradisional, sisanya menggunakan teknik semi-intensif (Kajian Penyusunan Keunggulan Kompetitif Bidang Perikanan Kabupaten Sidoarjo, 2012).

Berdasarkan data TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Sidoarjo, tercatat jumlah rumah tangga sasaran berdasarkan hasil pendataan PPLS'2011 yang dirilis oleh TNP2K terdapat 99.492 RTS atau (375.061 jiwa) dengan income perkapita 30% menengah kebawah tersebar di 18 kecamatan. Selain PPLS 2011, Basis Data Terpadu memanfaatkan sumber informasi lain seperti karakteristik desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, data kementerian/program, yang relevan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan karakteristik tertentu, sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Hasil PPLS 2011
di Kabupaten Sidoarjo (Jiwa)

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran			Jumlah
	Kel-1	Kel-2	Kel-3	
Sidoarjo	1.100	1.592	2.178	4.870
Buduran	804	1.129	1.525	3.458
Candi	980	1.614	2.075	4.669
Porong	1.414	1.873	1.946	5.233
Krembung	2.494	2.454	1.875	6823
Tulangan	1.838	2.396	1.996	6.230
Tanggulangin	1.044	1.441	1.477	3.962
Jabon	1.684	2.155	1.954	5.793
Krian	3.187	3.205	2.796	9.188
Balombendo	2.557	2.847	2.497	7.901
Wonoayu	1.921	1.996	1.481	5.398
Tarik	2.467	3.249	2.833	8.549
Prambon	2.350	2.631	1.640	6.621
Taman	1.199	2.289	3.398	6.886
Waru	906	1.409	1.997	4.312
Gedangan	444	812	1.298	2.554
Sedati	1.199	1.065	1.171	3.435
Sukodono	1.101	1.244	1.265	3.610
Jumlah	28.689	35.401	35.402	99.492

Sumber : BDT PPLS 2011 TKPKD Kabupaten Sidoarjo, 2015

Capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan prestasi, dengan menurunnya angka kemiskinan. Pada tahun 2013, berdasarkan data Susenas BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tercapai sebesar 6,69 persen, jauh lebih rendah daripada angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73 persen dan nasional sebesar 11,66 persen. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,93 dan indeks keparahan kemiskinan meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,22. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin besar, dan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari

angka garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang hidup dengan pengeluaran dibawah angka garis kemiskinan nasional, di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013, berdasarkan data Susenas BPS sebanyak 135.915 jiwa.

Dari 18 kecamatan tersebut diatas, terdapat kecamatan yang dikategorikan sebagai kawasan perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, yaitu terdapat di:

- a. Kecamatan Waru, seluas 402,2 Ha ;
- b. Kecamatan Sedati, seluas 1919,13 Ha ;
- c. Kecamatan Buduran, seluas 1731,20 Ha ;
- d. Kecamatan Sidoarjo, seluas 3127,9 Ha ;
- e. Kecamatan Candi, seluas 1031,7 Ha ;
- f. Kecamatan Tanggulangin, seluas 496,6 Ha ;
- g. Kecamatan Porong, seluas 496,3 Ha ;
- h. Kecamatan Jabon, seluas 4144,1 Ha.

Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah pesisir di Kabupaten Sidoarjo adalah Kecamatan Jabon, Sedati, Buduran dan Sidoarjo. Adapun desa-desa yang termasuk dalam kategori pesisir berjumlah 10 desa, yaitu desa Banjar Kemuning, Kalanganyar, Tambak Cemandi, dan Gisik Cemandi, Segoro Tambak di Kecamatan Sedati, Kelurahan Gebang di Kecamatan Sidoarjo, desa Sawohan di Kecamatan Buduran dan desa Kupang dan Tambak Kalisogo di Kecamatan Jabon.

Hasil *sampling survey* kepada penduduk miskin di desa pesisir menunjukkan bahwa semua program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah pusat dan provinsi telah dilaksanakan dengan baik di semua desa/kelurahan tersebut. Program tersebut meliputi : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Raskin (Beras bagi Masyarakat Miskin), Program Keluarga Harapan (PKH), PNPM Mandiri Perkotaan, Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Bantuan pemberdayaan bagi keluarga nelayan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui berbagai SKPD seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM (Diskoperindag), Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Kondisi kemiskinan kecamatan yang di survey berdasarkan data penduduk miskin penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan, dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Desa Pesisir dan RT Sasaran Per Kecamatan
Kabupaten Sidoarjo, 2016

Kecamatan	Jumlah			
	RT Sasaran	Desa	Desa Pesisir	
Sedati	3.435	16	Desa Segoro Tambak	197
			Desa Banjar Kemuning	119
			Desa Tambak Cemandi	459
			Desa Gisik Cemandi	324
			Desa Kalanganyar	283
Buduran	3.458	15	Desa Sawohan	292
Jabon	5.793	15	Desa Kupang	590
			Desa Tambak Kalisogo	337
Sidoarjo	4.870	24	Kelurahan : Gebang	372
Waru	4.312	17	Desa Tambak Oso	233
Jumlah	17.485	87	9 Desa + 1 Kelurahan	3.206

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, TKPKD Kabupaten Sidoarjo, 2015

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki desa/kelurahan pesisir atau berbatasan dengan pantai, yaitu Kecamatan Sedati, Buduran, Jabon, Sidoarjo dan Waru. Berdasarkan kondisi pemetaan, maka desa/kelurahan pesisir di masing-masing kecamatan meliputi: di Kecamatan Sedati terdapat 5 (lima) desa pesisir yaitu desa Segoro Tambak, Banjar Kemuning, Tambak Cemandi, Gisik Cemandi dan Kalanganyar, di Kecamatan Buduran terdapat 1 (satu) desa pesisir yaitu Sawohan, di Kecamatan Sidoarjo, terdapat 1 (satu) kelurahan pesisir yaitu Gebang, di Kecamatan Jabon terdapat 2 (dua) desa pesisir yaitu Kupang dan Tambak Kalisogo, dan di Kecamatan Waru terdapat 1 (satu) desa pesisir yaitu Tambak Oso.

Secara persentase, jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir relatif rendah. Jumlah rumah tangga miskin di desa-desa pesisir tercatat sebanyak 3.206 rta, dibandingkan jumlah rta miskin keseluruhan di, sebanyak 17.485 rta, atau sebesar 18,34 persen dari 5 kecamatan yang memiliki wilayah desa pesisir. Apabila dibandingkan dengan jumlah rta miskin di seluruh Kabupaten Sidoarjo, maka proporsinya hanya mencapai 3,22 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut memiliki beragam pekerjaan yang terkait dengan kawasan pesisir. 700 jiwa diantaranya adalah penduduk yang hanya bekerja sebagai nelayan sebagai penghasil utamanya. Selain itu terdapat buruh usaha perikanan, pengolah ikan dan pedagang ikan. Berdasarkan dokumen Kecamatan Sedati dalam Angka tahun 2015, keadaan umum kemiskinan dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.
Karakteristik Desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, 2015

No.	Desa	Jumlah			Luas Wilayah (km ²)
		Dusun	KK	RT Miskin	
Pesisir					
1	Segoro Tambak	1	449	197	8,35
2	Banjar Kemuning	1	310	119	5,59
3	Tambak Cemandi	2	930	459	4,43
4	Gisik Cemandi	2	550	324	1,49
5	Kalanganyar	1	1.436	283	27,30
Bukan Pesisir					
6	Kwangsan	2	951	98	2,34
7	Pepe	3	3.132	243	9,99
8	Buncitan	3	1.260	245	1,82
9	Cemandi	1	1.700	152	5,02
10	Pulungan	1	703	63	0,39
11	Betro	4	2.310	211	1,79
12	Sedati Agung	3	2.140	60	1,96
13	Sedati Gede	3	3.281	255	1,70
14	Pabean	6	5.343	479	2,34
15	Semampir	1	568	107	1,46
16	Pranti	1	670	140	3,29
	Jumlah	35	25.733	3.435	79,26

Sumber: Kecamatan Sedati Dalam Angka, 2015

Jumlah rumah tangga miskin penerima manfaat program terbesar di Kecamatan Sedati dan termasuk dalam kategori desa pesisir berada di desa Tambak Cemandi, sebanyak 459 rumah tangga atau KK. Sedangkan dalam kategori bukan pesisir, rumah tangga miskin terbanyak berada di desa Pabean. Jumlah rumah tangga miskin di desa pesisir paling sedikit berada di desa Banjar

Kemuning, yaitu 119 rumah tangga, dan di desa bukan pesisir paling sedikit dijumpai di Pulungan, hanya 63 rumah tangga. Jumlah penduduk Kecamatan Sedati pada tahun 2014, tercatat sebanyak 99.048 jiwa. Penduduk paling banyak berada di desa Pabean yaitu 19.627 jiwa, dan yang paling sedikit penduduknya di desa Banjar Kemuning yaitu 1.560 jiwa, karena sebagian besar wilayah desa ini merupakan tambak dan lahan milik pengembang perumahan. Keadaan umum Kecamatan Buduran dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.
Karakteristik Desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, 2015

No.	Desa	Jumlah			Luas Wilayah (Hektar)
		Dusun	KK	RT Miskin	
Pesisir					
1	Sawohan	2	720	292	1.041,7
Bukan Pesisir					
2	Entalsewu	2	1.696	360	132,0
3	Pagerwojo	9	2.470	316	166,4
4	Sidokerto	3	2.373	279	171,9
5	Buduran	2	1.144	128	106,5
6	Siwalanpanji	3	1.793	301	213,0
7	Sidomulyo	1	415	103	56,6
8	Prasung	3	1.217	221	727,8
9	Damarsi	2	1.691	286	493,7
10	Dukuh Tengah	1	1.676	128	164,2
11	Banjarsari	3	591	165	125,4
12	Wadungasih	6	1.412	118	127,6
13	Banjarkemantren	4	1.456	340	203,0
14	Sukorejo	2	969	94	98,7
15	Sidokepung	3	2.687	326	274,0
	Jumlah	46	22.310	3.457	4.102,5

Sumber: Kecamatan Buduran Dalam Angka, 2015

Jumlah rumah tangga miskin penerima manfaat program di Kecamatan Buduran dalam kategori desa pesisir berada di desa yang merupakan kawasan terpencil yaitu desa Sawohan, yaitu sebanyak 292 rumah tangga atau KK. Sedangkan dalam kategori bukan pesisir, rumah tangga miskin terbanyak berada di desa Entalsewu, yaitu 360 rumah tangga. Rumah tangga miskin paling sedikit dijumpai di desa Sukorejo, yaitu 94 rumah tangga. Kecamatan berikutnya adalah Kecamatan Jabon, yang memiliki dua desa pesisir yaitu desa Kupang dan Tambak Kalisogo. Keadaan umum Kecamatan Jabon dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.
Karakteristik Desa di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, 2015

No.	Desa	Jumlah			Luas Wilayah (Hektar)
		Dusun	KK	RT Miskin	
Pesisir					
1	Kupang	4	1.085	590	2.242
2	Tambak Kalisogo	2	730	337	1.176
Bukan Pesisir					
3	Panggreh	2	1.135	335	172
4	Trompoasri	3	1.834	918	273
5	Kedungrejo	6	2.100	487	311
6	Kedungpandan	3	1.375	899	1.723
7	Semambung	2	571	331	200
8	Balontani	5	826	133	213

Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)

No.	Desa	Jumlah			Luas Wilayah (Hektar)
		Dusun	KK	RT Miskin	
9	Jemirahan	2	811	178	173
10	Dukuhsari	6	1.706	270	221
11	Kedungcangkring	7	1.161	348	217
12	Pejarakan	1	120	22	62
13	Besuki	0	870	234	217
14	Keboguyang	4	1.376	528	206
15	Permisan	1	443	183	1.236
	Jumlah	48	16.143	5.793	8.642

Sumber: Kecamatan Jabon Dalam Angka, 2015

Jumlah rumah tangga miskin penerima manfaat program di Kecamatan Jabon dalam kategori desa pesisir berada di desa yang merupakan kawasan terpencil yaitu desa Kupang dan Tambak Kalisogo, yaitu masing-masing sebanyak 590 dan 337 rumah tangga atau KK. Sedangkan dalam kategori bukan pesisir, rumah tangga miskin terbanyak berada di desa Tromposari, yaitu 918 rumah tangga. Rumah tangga miskin paling sedikit dijumpai di desa Pejarakan, yaitu 22 rumah tangga.

Kecamatan berikutnya adalah Kecamatan Sidoarjo, yang memiliki 1 kelurahan pesisir yaitu Kelurahan Gebang. Keadaan umum Kecamatan Sidoarjo dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.
Karakteristik Desa di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, 2015

No.	Desa/Kel.	Jumlah			Luas Wilayah (Hektar)
		Dusun	KK	RT Miskin	
Pesisir					
1	Kel. Gebang	3	1.461	372	1.222,9
Bukan Pesisir					
2	Lebo	1	1.294	195	217,6
3	Suko	4	2.150	152	204,6
4	Banjarbendo	3	1.175	298	141,9
5	Lemah Putro	-	3.570	383	88,5
6	Sidokare	-	4.923	363	114,4
7	Celep	-	2.089	142	52,8
8	Sekardangan	1	2.159	140	823,9
9	Rangkah Kidul	1	1.125	204	258,0
10	Bulusidokare	-	2.515	176	970,0
11	Pucanganom	-	1.672	157	403,7
12	Pekauman	-	764	87	8,77
13	Sidokumpul	-	2.231	179	66,0
14	Sidoklumpuk	-	1.673	115	46,7
15	Bluru Kidul	3	7.048	187	295,0
16	Kemiri	2	1.650	189	322,9
17	Pucang	-	1.772	45	86,3
18	Magersari	-	4.087	172	114,0
19	Jati	2	3.422	131	141,6
20	Cemengkalang	3	859	73	94,1
21	Cemengbakalan	2	1.325	340	109,9
22	Urangagung Jedong	2	1.860	332	194,3
23	Sarirogo	2	987	173	153,0
24	Sumpat	2	1.094	264	124,9
	Jumlah	48	52.905	4.869	6.256,0

Sumber: Kecamatan Sidoarjo Dalam Angka, 2015

Jumlah rumah tangga miskin penerima manfaat program di Kecamatan Sidoarjo dalam kategori desa pesisir berada di Kelurahan Gebang yaitu 372 rumah tangga atau KK. Sedangkan dalam kategori bukan pesisir, rumah tangga miskin terbanyak berada di desa Lemah Putro, yaitu 383 rumah tangga. Rumah tangga miskin paling sedikit terdapat di desa Pucang, yaitu 45 rumah tangga.

Permasalahan yang masih muncul dan harus diatasi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir, antara lain:

1. Validasi data rumah tangga miskin yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat, sehingga sering menimbulkan potensi konflik sosial dan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah.
2. Program pemberdayaan masyarakat yang ada belum sepenuhnya mampu mengentaskan kemiskinan rumah tangga miskin terutama bagi masyarakat nelayan karena banyak kendala yang menyertai pasca proyek selesai. Misalnya, kegiatan pelatihan membuat krupuk ikan akan berhenti setelah acara pelatihan, karena ketidakmampuan kelompok usaha yang dilatih dalam menjual/memasarkan produk tersebut.
3. Tempat Pelelangan Ikan yang berada di desa Gisik Cemandi sudah lama tidak berfungsi karena status lahannya bukan milik Pemerintah daerah maupun asset desa, tetapi milik TNI AL. Fasilitas tersebut saat ini berfungsi sebagai pasar ikan informal untuk melayani kebutuhan ikan bagi masyarakat sekitar.
4. Masih dibutuhkan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga nelayan dan buruh perikanan untuk mengatasi masalah ketidakpastian pendapatan keluarga nelayan dari aktifitas melaut/menangkap ikan. Antara lain pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil olahan ikan.
5. Masih banyak masyarakat miskin yang tinggal di atas lahan milik TNI AL sehingga tidak dapat menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RRTLH). Bahkan meskipun dana rehabilitasi tersebut disediakan oleh keluarga miskin tersebut, pihak pemilik lahan tidak akan mengizinkan perbaikan rumah.
6. Bantuan dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa-desa wilayah pesisir masih bersifat bantuan insidental dan bukan kegiatan yang berkelanjutan. Sehingga belum berdampak nyata pada peningkatan pendapatan masyarakat dan tidak memberikan kontribusi pada penanggulangan kemiskinan.
7. Terjadinya ketergantungan pada kegiatan proyek pemerintah dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Misalnya setelah dibantu sarana jaring untuk menangkap ikan, dan terjadi kerusakan jaring tersebut, nelayan tidak memperbaiki sendiri, tetapi berharap adanya bantuan selanjutnya dari dinas.
8. Adanya hambatan dari aturan pemerintah, yaitu kewajiban memiliki status badan hukum bagi kelompok petambak atau KUB yang baru agar bisa mendapatkan bantuan atau kegiatan proyek.
9. Adanya keterbatasan anggaran sehingga hanya sebagian kecil yang menerima bantuan dengan kriteria tertentu dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di desa pesisir tersebut. Anggaran yang dinas (kabupaten/provinsi) yang tersedia tidak mampu membantu pemberdayaan nelayan secara optimal.

10. Adanya kegiatan wisata kolamancing di dalam dan sekitar desa pesisir merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan karena adanya kunjungan dari penduduk di luar desa. Hal ini belum mendapatkan dukungan dan perhatian dari dinas terkait maupun kepedulian perusahaan melalui CSR sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa pesisir.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Wilayah Pesisir

Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengentaskan masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumah tangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dari yang bersifat rescue (penyelamatan), semisal upaya jangka pendek untuk menyelamatkan rumah tangga miskin agar tidak semakin terpuruk akibat kenaikan harga BBM, sampai dengan upaya recovery (pemulihan) sebagai upaya jangka panjang untuk pengurangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Wilayah pesisir berkaitan erat dengan potensi kelautan dan perikanan. Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain : luas lahan tambak, depo pemasaran ikan (DPI), tambak milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo, balai benih ikan (BBI), dan organisasi masyarakat (ormas) kelautan dan perikanan. Uraian potensi tersebut sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah membangun Depo Pemasaran Ikan (DPI), sebagai fasilitas sarana dan prasarana pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Depo tersebut berdiri diatas lahan seluas 3,8 hektar, dengan kelengkapan fasilitas berupa area parkir pengunjung seluas 500 meter persegi, borg ikan sebanyak 14 unit dan area pasar ikan segar. Pembangunan DPI tersebut bertujuan untuk mempertahankan mutu ikan, meningkatkan minat beli ikan dari masyarakat, meningkatkan pendapatan petambak dan nelayan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo dan meningkatkan nilai tambah produk-produk olahan perikanan. Tujuan lainnya adalah diharapkan mampu mengatasi masalah naik turunnya harga ikan karena adanya proses lelang dalam transaksi jual beli di DPI. Transaksi produk perikanan yang berlangsung di DPI mencapai 10-15 ton per hari. Pembangunan pasar ikan dan pusat olah-olah ikan tersebut berada di jalan lingkar timur Kabupaten Sidoarjo. Sejak diresmikan pada tahun 2012, tidak berfungsi secara optimal sesuai tujuan pembangunannya. Meskipun saat ini masih tetap berfungsi sebagai pasar ikan pada pagi hari, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, restoran, maupun pedagang besar.

Luas lahan tambak yang berstatus asset pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini sebesar 18,9 hektar yang tersebar di lokasi: Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo seluas 11,5 hektar, Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi seluas 6 hektar, dan Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati seluas 1,4 hektar. Sedangkan balai benih ikan (BBI) terdapat di desa Wadungasih Kecamatan Buduran.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pemberdayaan masyarakat di desa-desa pesisir, antara lain: pemberian bantuan jaring ikan, sosialisasi keamanan pangan dengan tidak menggunakan

formalin sebagai pengawet ikan. Keberadaan komoditi ikan di Sidoarjo ada dua macam, yakni produksi hasil budidaya dan hasil tangkap. Ikan hasil tangkap biasanya mengalami pembusukan dengan lebih cepat jika tak diawetkan dengan es batu. Dinas juga menggelar pelatihan teknis bahaya penggunaan formalin pada produk hasil perikanan. Tujuannya untuk mengantisipasi masuknya ikan berformalin dari luar daerah. Pasalnya, yang diduga melakukan atau memberi formalin pada ikan segar, dengan tujuan agar tahan lama itu kebanyakan adalah para tengkulak atau pedagang pengumpul bukan pemasok atau produsen.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melibatkan organisasi masyarakat yang terdiri dari Kelompoktani Tambak, Kelompoktani Kolam, Kelompok Nelayan dan Kelompok Pengolah Perikanan. Kelompok tersebut tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 7.

Kelompok Tani Tambak, Budidaya Air Tawar, Nelayan dan Pengolah Perikanan di Kabupaten Sidoarjo, 2015

No.	Kecamatan	Kelompok			
		Petambak	Budidaya Air Tawar	Nelayan	Pengolah Perikanan
1.	Sidoarjo	-	-	1	1
2.	Buduran	4	5	-	1
3.	Candi	3	4	3	3
4.	Porong	1	3	-	-
5.	Tanggulangin	3	2	-	1
6.	Jabon	10	-	-	1
7.	Waru	5	-	1	1
8.	Sedati	-	1	5	1
9.	Wonoayu	-	2	-	-
10.	Krian	-	1	-	-
11.	Taman	-	1	-	-
	Jumlah	26	19	10	9

Sumber : Lakip Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sidoarjo, 2015

Pada akhir tahun 2015 Para nelayan Desa Gisik Cemandi, Sedati, Sidoarjo, mendapatkan subsidi alat tangkap ikan (jaring) dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sidoarjo. Nelayan dari tujuh kelompok nelayan desa teraebut mendapatkan jaring ikan sebanyak tujuh sampai delapan jaring perkelompok. Bantuan ini diberikan khusus bagi nelayan tradisional dan nelayan yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Diharapkan, bantuan ini dapat meningkatkan hasil tangkap nelayan. Ada tiga jenis jaring yang diberikan, yaitu jaring ikan, jaring belat, dan jaring udang ketak. Jaring ini mampu menarik ikan atau udang seberat maksimal 1 gross ton. Kendati telah mendapat bantuan jaring, para nelayan ini mengeluhkan hasil tangkapan yang berkurang. Di samping faktor alat, keadaan cuaca juga memengaruhi hasil tangkapan nelayan.

Hingga kajian ini dilakukan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo baru memiliki kebijakan publik untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat wilayah pesisir berupa:

1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan Di Kabupaten Sidoarjo.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani/Pembudidaya Nelayan Di Kabupaten Sidoarjo.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, salah satu SKPD pelaksana Perbup Nomor 25 Tahun 2013 tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Subsektor Perikanan yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sasarannya adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarganya. Namun demikian penyusunan peraturan tersebut lebih menitik beratkan pada penataan tugas dan fungsi para penyuluh pertanian dan perikanan.

Kemudian pada tahun 2014 disahkan sebuah Peraturan Daerah yang bertujuan melindungi dan memberdayakan petani, nelayan dan pembudidaya ikan (petani tambak) dari kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil. Peraturan daerah tersebut memiliki banyak tujuan dan manfaat untuk melindungi keberadaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian belum dapat dilaksanakan hingga saat ini karena belum tersusunnya peraturan penjabaran Perda tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan oleh SKPD terkait.

Penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir tidak termasuk dalam tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian, rencana strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan paling banyak menyentuh dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Meskipun dalam praktiknya, pembinaan masyarakat di wilayah pesisir merupakan kegiatan lintas sektor, artinya berbagai SKPD turut serta dan bersama-sama melakukan kegiatan di wilayah tersebut.

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, meliputi: a) pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, b) pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, c) pengembangan budidaya perikanan, d) pengembangan perikanan tangkap, e) optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, f) perlindungan dan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan, g) pengembangan pengelola tambak dan hasil tambak. Semua program tersebut telah memiliki indikator kinerja utama, target dan realisasi capaian yang kuantitatif. Namun demikian semua program tersebut tidak terkait secara spesifik dengan upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir. Karena tujuan utamanya adalah pengembangan kapasitas SDM, produksi dan kelestarian alam pendukung perikanan dan kelautan. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain: kompetensi pelaku usaha perikanan belum memadai untuk menghadapi persaingan global, perubahan iklim yang bersifat anomali dan mempengaruhi hasil tangkapan ikan laut dan budidaya, terbatasnya sarana usaha penangkapan ikan, terbatasnya modal nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan air tawar masih menerapkan teknologi tradisional, dan upaya rehabilitasi mangrove masih belum mampu mengimbangi kerusakan ekosistem yang ada.

Pada tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo mendata ulang nelayan yang ada dan diberi kartu nelayan. Kartu nelayan bertujuan untuk memudahkan dalam pembinaan. Selain itu, sebagai identitas saat melaut, apabila sampai terjadi kecelakaan nelayan mudah dikenali. Nelayan juga diimbau agar bergabung dengan kelompok nelayan (KN) yang sudah sah. Kelompok nelayan yang sudah terdata secara administrasi tersebut akan lebih mudah dalam pembinaan maupun dalam pemberian bantuan. Berdasarkan data terkini (update data) tahun 2016, jumlah nelayan yang sudah terdata secara resmi sebanyak 700 orang. Adapun jumlah perahu nelayan yang sudah terdata sebanyak 612 unit perahu tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo. Masa berlaku izin kartu nelayan selama tiga tahun. Pola pembinaan yang dilakukan pemerintah diantaranya bersifat pelatihan-pelatihan, dan bantuan-bantuan sarana dan prasarana nelayan, seperti jaring, cool box, mesin, GPS (*global positioning system*), dan perahu. Jumlah nelayan terbanyak berada di wilayah Kecamatan Sedati, yaitu di Desa Gisik Cemandi, Desa Tambak Cemandi, Desa Segoro Tambak, dan Banjar Kemuning.

Program penanggulangan kemiskinan dari BPMPKB antara lain dilaksanakan melalui Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Uraian kegiatan selama tahun 2015, sebagai berikut:

a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat program pemberdayaan berupa stimulus yang dapat menggugah minat partisipasi masyarakat. Dalam tahun 2015, jumlah dana pembangunan yang dilaksanakan masyarakat secara swadaya di wilayah 349 Desa/kelurahan adalah sebanyak Rp 89.510.403.300,00 dengan target yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2015 sebesar **Rp 93.493.000.000,-** tercapai sebesar 96%. Atas kegiatan masyarakat tersebut Pemerintah menyalurkan bantuan dana blokgrant tahun 2015 sebesar Rp **9.493.000.000,-** untuk 346 Desa/Kelurahan dan 565 lembaga. Selanjutnya jika dibandingkan dengan jumlah dana tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 88.513.303.300,-. maka jumlah dana pembangunan swadaya masyarakat tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 997.100.000,- atau 1,13%.

Tercapainya partisipasi masyarakat disebabkan karena masyarakat merasa bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggungjawab bersama. Namun demikian sosialisasi secara terus menerus dan bersinambungan dengan budaya gotong royong tentang partisipasi masyarakat dilakukan dalam setiap program pembangunan dengan melibatkan seluruh SKPD yang terkait, Peran dan keterlibatan dari para tokoh masyarakat, ulama, dan LSM perlu ditingkatkan.

b. Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH)

Jumlah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi/perbaikan pada tahun 2015 sebanyak 159 unit rumah yaitu program reguler 99 unit di 15 Kecamatan dan Program Terpadu Berbasis Kawasan/PTBK 60 unit di 2 Kecamatan yaitu Tarik dan Krembung, atau terealisasi 45,4%, dari target yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2015 sebanyak 350 unit rumah. Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selain memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memperoleh

bantuan dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh KODIM dan Corporate Social Responsibility.(CSR).

Pemberdayaan masyarakat pesisir juga dilakukan melalui kerjasama dengan LSM Koalisi Perempuan Indonesia Jatim (KPI Jatim) bersama WWF-Indonesia melakukan sosialisasi *Better Management Practice* (BMP) Perikanan Kerang di Sidoarjo pada 13 Maret 2016. Sosialisasi BMP Perikanan Kerang ini dihadiri oleh 17 orang nelayan kerang, dua orang perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo serta seorang penyuluh perikanan Kabupaten Sidoarjo. Tindak lanjut dari adanya sosialisasi BMP Perikanan Kerang ini, adalah pendampingan KPI Jatim pada kelompok nelayan dalam melakukan perbaikan pengelolaan perikanan kerang dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dan sumber daya kerang di Kabupaten Sidoarjo. Harapannya, di bawah bimbingan KPI Jatim nelayan sebagai pelaku perikanan secara langsung dapat menerapkan standar-standar yang ada di BMP untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang lebih baik, bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

Selain perikanan tangkap, wilayah pesisir juga memiliki potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu budidaya rumput laut. Jenis rumput laut yang sesuai untuk dibudidayakan di wilayah tambak Kabupaten Sidoarjo adalah *Gracillaria* sp. Potensi budidaya rumput laut Kabupaten Sidoarjo mencapai 5.000 ton per tahun. Dengan wilayah potensial budidaya di Kecamatan Jabon, khususnya Desa Kedungpandan dan Desa Kupang. Saat ini, daya saing produk rumput laut Kabupaten Sidoarjo masih rendah, volume penjualan produk rumput laut kering baru mencapai 1.300 ton per tahun. Sehingga masih dapat dikembangkan lebih besar lagi dan menjadi alternatif lapangan kerja baru untuk menanggulangi kemiskinan.

Kepedulian terhadap kemiskinan di wilayah pesisir juga dilakukan oleh lembaga sosial Dompot Dhuafa Surabaya. Para ibu-ibu rumah tangga di komunitas nelayan cukup produktif membantu perekonomian rumah tangga dengan membuat produk-produk olahan ikan atau bahan baku laut lainnya. Problem pemasaran dan teknik produksi yang masih sederhana masih menjadi kendala dalam mengembangkan omzet hasil olahan ikan. Untuk mengatasi hal tersebut Dompot Dhuafa menggulirkan Program Klaster Mandiri di wilayah Sidoarjo melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Aneka Olahan Ikan sejak April 2011. Program bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di empat desa sasaran : Desa Segoro Tambak, Desa Banjar Kemuning, Desa Gisik Cemandi, dan Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Fokus program pada pengembangan produk turunan berbasis sumberdaya perikanan dan kelautan. Varian produknya berupa kerupuk kerang, kerupuk kupang, kerupuk ikan payus, kerupuk ikan udang, petis kupang, terasi udang, bandeng presto, bandeng tanpa duri dan ikan asin (mentahan).

Penyebab Kemiskinan di Wilayah Pesisir

Fenomena kemiskinan di desa-desa pesisir merupakan akumulasi dari berbagai penyebab, yaitu natural (karena karakter alam), struktural (karena persaingan usaha, kepemilikan asset dan modal, dan infrastruktur daerah), dan kultural (karena budaya dan perilaku masyarakat). Oleh karena itu dibutuhkan

kebijakan dan strategi khusus bagi masyarakat nelayan, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo. Meskipun nelayan tidak banyak jumlahnya, namun kemiskinan di wilayah pesisir sangat identik dengan kehidupan nelayan, yang sangat bergantung pada kegiatan menangkap ikan di laut dan musim, dan tidak memiliki kepastian dalam menghasilkan pendapatan keluarganya. Kemiskinan nelayan tersebut merupakan kemiskinan natural. Sementara, pembudidaya ikan di tambak biasanya memiliki taraf kehidupan yang lebih layak dan bukan kelompok masyarakat miskin.

Kebijakan dan strategi tersebut dibutuhkan untuk menerjemahkan aturan tentang perlindungan dan pemberdayaan dalam Peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pembudidaya dan nelayan. Batasan mengenai perlindungan dalam Perda tersebut menyatakan bahwa Perlindungan petani/pembudidaya dan nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. Sedangkan batasan pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani/pembudidaya dan nelayan untuk melaksanakan Usahatani dan perikanan yang lebih baik melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan perikanan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan –pertanian dan daerah tangkapan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan. Peraturan daerah tersebut disusun dalam upaya mengatasi penyebab kemiskinan struktural yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo.

Kemiskinan kultural juga terjadi pada masyarakat nelayan. Pada umumnya nelayan merupakan lapisan masyarakat yang konsumtif dan tidak terbiasa menabung. Karena sifat pekerjaan yang tidak menentu hasilnya, keluarga nelayan biasanya terlibat dalam hutang kepada juragan pedagang ikan atau pemilik modal yang membiayai kegiatan menangkap ikan. Penyebab kemiskinan ini sulit diatasi oleh program pemerintah yang biasanya bersifat edukasi dan pembentukan usaha ekonomi. Karena usaha yang sedang berjalan biasanya akan terhambat karena modal yang disediakan oleh pemerintah digunakan untuk membayar hutang.

Menurut seorang tokoh masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo, selain adanya sebagian warga yang masih dibawah garis kemiskinan, masih banyak warga yang merasa dirinya miskin. Gejala merasa miskin ini disebut budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan terlihat pada kalangan nelayan dan buruh nelayan ketika pemerintah mengucurkan bantuan kepada masyarakat. Semua keluarga akan merasa berhak mendapatkan bantuan dan merasa masih miskin. Sehingga bantuan yang berupa barang untuk melaut dijual agar dapat dibagi rata dengan tetangganya. Kebiasaan ini sangat merugikan bagi masyarakat itu sendiri.

Salah satu lembaga ekonomi yang mampu membantu dan mendukung kehidupan nelayan dan petambak di wilayah pesisir adalah koperasi. Salah satunya adalah koperasi Mina Mandiri. Koperasi ini telah banyak membantu warga dengan memberikan bantuan pinjaman lunak (berbunga rendah) baik untuk kebutuhan konsumsi maupun produktif. Peranan koperasi tersebut perlu didukung

keberadaannya oleh pemerintah dengan membantu memberikan permodalan baik yang bersifat hibah maupun modal yang bunga rendah.

Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Karena potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo, sangat besar dan mampu menjadi modal ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat di kawasan pesisir.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir dapat disusun dengan arah sebagai berikut:

1. Memberikan iklim yang kondusif bagi masyarakat pesisir baik pembudidaya ikan maupun nelayan agar dapat menjalankan usahanya dengan bebas dan tidak mengalami hambatan, melalui penetapan regulasi yang pro rakyat dan pro kemiskinan.
2. Memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada masyarakat pesisir dalam aspek peningkatan kualitas sumberdaya manusia, aspek peningkatan usaha ekonomi keluarga, aspek harmonisasi lingkungan/masyarakat sekitar, dan aspek pemeliharaan sumberdaya alam perikanan.
3. Memberikan peningkatan akses kepada sumberdaya keuangan atau permodalan untuk mendukung perkembangan usaha masyarakat.
4. Memberikan bantuan perlindungan sosial guna mempertahankan kualitas hidup masyarakat pesisir, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun ketahanan pangan.

Pembinaan masyarakat pesisir dalam kerangka mengentaskan dari kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Pembinaan kualitas sumberdaya manusia** yang meliputi: a) peningkatan kreatifitas individu; b) Investasi pada modal manusia (human capital) yaitu dalam bidang pendidikan dan kesehatan; c) Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok baik formal maupun informal sebagai suatu cara untuk mensinergikan dan memadukan kekuatan individu; d) Memperkuat kelembagaan organisasi dan kelompok sehingga efisiensi bisa tercapai; e) Memperbaiki budaya kerja, kerja keras, tanggungjawab, dan hemat, dan f) Menghilangkan sifat dan mental negatif, boros, konsumtif yang menghambat produktivitas.
2. **Pembinaan kualitas lingkungan/masyarakat sekitar** yang meliputi: a) Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal mereka maupun habitat atau kawasan tempat kegiatan ekonomi produktif dijalankan; b) Membangun infrastruktur terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi; c) Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial dan daya dukung lingkungannya; d) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi, rehabilitasi, reboisasi dan lain sebagainya.
3. **Pembinaan usaha ekonomi produktif** yang meliputi: a) Meningkatkan keterampilan usaha, pengelolaan bisnis skala kecil dan menguasai teknologi tepat guna; b) Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap teknologi,

modal, pasar dan informasi pembangunan; c) Membangun kemitraan mutualistis diantara sesama pelaku ekonomi rakyat dan melalui kerjasama perusahaan usaha besar; d) Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal, dan e) Menyediakan peraturan pemerintah yang menjamin berjalannya proses pengentasan kemiskinan.

4. **Pembinaan kualitas sumberdaya alam** yang meliputi: a) Memberikan konsepsi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; b) Menghidupkan kembali hak dan kearifan masyarakat lokal; Menerapkan pemantauan pengelolaan sumber daya dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal; c) Menerapkan teknologi ramah lingkungan; d) Membangun kesadaran akan pentingnya nilai strategi sumberdaya bagi generasi saat ini dan yang akan datang; e) Merehabilitasi habitat dan memperkaya sumberdaya alam.

Selanjutnya, dengan membina keempat aspek tersebut, maka di susun sebuah model pemberdayaan ekonomi pesisir sebagai berikut:



Gambar 1.
Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo

Guna menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat miskin tersebut. Identifikasi tersebut menggunakan metode analisis SWOT. di wilayah pesisir sebagai berikut:

Tabel 8.
Analisis SWOT Masyarakat Miskin di Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, 2016

No.	Indikator	Uraian
A		Faktor Internal
1	Kekuatan (Strength)	<ul style="list-style-type: none"> memiliki sumber daya laut yang melimpah misalnya: berbagai macam ikan laut, payau dan ikan air tawar, kerang, kupang, cumi-cumi, udang, dan rumput laut, berbatasan dengan kota besar sehingga bisa mendapatkan alternatif pekerjaan tambahan lainnya. transportasi dan infrastruktur mendukung kegiatan budidaya dan penangkapan ikan, fasilitas untuk menangkap ikan, sudah menggunakan kapal motor, sebagian telah memiliki lahan tambak sendiri, kondisi sosial masyarakat yang kondusif dan religious
2	Kelemahan (Weakness)	<ul style="list-style-type: none"> hanya mengandalkan dari sumber laut saja, harga bahan bakar kapal semakin mahal mahal dan sering langka,

No.	Indikator	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • biaya upacara adat pesisir yang membutuhkan biaya tinggi, • masih adanya struktur sosial ekonomi di masyarakat yang merugikan nelayan kecil, • sumber daya manusia kurang berkualitas, • tidak berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan dan kurang layaknya Pelabuhan Pendaratan Ikan di pesisir • pendapatan nelayan berfluktuasi tergantung hasil dan jenis ikan tangkapan
B		Faktor Eksternal
3	Peluang (Opportunity)	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah pesisir merupakan obyek alam yang indah sebagai sumber pendapatan daerah dengan membuka kegiatan pariwisata. • Membuka tempat makan sea food sebagai usaha rumah tangga nelayan, • Pembuatan produk kerajinan berbahan kerang dan pasir sebagai oleh-oleh daerah wisata tersebut, • Membuat makanan ringan dari hasil laut, dipasarkan di tempat wisata dan ke kota besar di sekitar Sidoarjo, • Mendirikan usaha jasa angkutan, penginapan dan pemandu wisata
4	Ancaman (Threat)	<ul style="list-style-type: none"> • Ikan semakin langka sehingga perlu jauh berlayar untukmendapatkan ikan, • Terjadi kerusakan alam/lingkungan • Cuaca dan iklim yang tidak menentu mengakibatkan hasil tangkapan nelayan tidak pasti, • Persaingan penangkapan ikan dengan nelayan daerah lain.

Sumber: Analisis Data Survey, 2016

Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir harus mampu memanfaatkan secara optimal sumberdaya perikanan dan kelautan yang dimiliki, dan tersedianya sarana dan prasarana penangkapan ikan laut yang sudah ada. Bagi petambak, selain mengusahakan budidaya ikan air tawar, juga melakukan diversifikasi usaha berupa pengolahan hasil ikan air tawar dan kegiatan pariwisata perikanan.

Kelemahan yang melekat pada kehidupan nelayan dapat diatasi dengan melakukan usaha tambahan seperti mengolah dan memasak ikan agar mendapatkan nilai tambah ekonomi dari hasil tangkapannya di laut. Pemerintah mengupayakan tersedianya tempat pendaratan ikan dan pelelangan ikan agar memudahkan nelayan dalam menjual hasil lautnya.

Peluang yang ada dapat dioptimalkan melalui pembinaan kelompok masyarakat yang telah dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), seperti melalui kelompok tambak, kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan air tawar dan kelompok pengolah dan pemasar ikan.

Sedangkan ancaman yang mungkin terjadi dapat diantisipasi dengan melakukan kegiatan konservasi sumberdaya kelautan seperti perluasan hutan mangrove dan penyelamatan terumbu karang dan budidaya rumput laut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey dan pembahasan diatas, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo baik melalui program pemerintah daerah maupun peran serta masyarakat telah mengalami kemajuan yang berarti. Angka kemiskinan makro telah menurun sedikit dari 6,97 persen pada tahun 2011 menjadi 6,69 persen pada tahun 2013, atau sekitar 0,28 persen saja.

2. Penurunan kemiskinan secara makro tersebut juga terjadi untuk masyarakat di wilayah pesisir yang dianalisis dalam kajian ini, yaitu di Kecamatan Sedati, Buduran, Sidoarjo, dan Jabon. Namun demikian, jumlah penurunan tersebut hingga tahun 2015 tidak dapat diketahui karena data yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah data BDT PPLS 2011.
3. Sumber penyebab kemiskinan di wilayah pesisir adalah rentannya kehidupan masyarakat yang bermata pencaharian nelayan dan buruh perikanan. Sulitnya mengatasi kemiskinan di wilayah pesisir karena penyebabnya adalah dari sifat mata pencaharian yang tidak pasti hasilnya, rendahnya kualitas SDM, dan budaya masyarakat yang tidak produktif. Data mengenai jumlah nelayan masih terus diverifikasi sejak tahun 2014, dan telah tercatat 1.520 jiwa nelayan. Meskipun sedikit jumlahnya, kehidupan keluarga nelayan dan permasalahannya masih merupakan sumber kemiskinan yang sulit diatasi hingga saat ini.
4. Berbagai program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten telah dilaksanakan di wilayah pesisir dalam periode 2011 hingga 2015, dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Terutama bantuan perlindungan sosial dan bantuan sarana produksi bagi nelayan dan usaha ekonomi keluarganya.
5. Mengukur capaian dan dampak setiap program terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah pesisir sangat sulit dilakukan, karena setiap program atau kegiatan hanya mencatat jenis kegiatan, jumlah anggaran dan lokasi sasarnya. Hasil monitoring dan evaluasi setiap program dan kegiatan masih sulit diperoleh. Oleh karena itu, prestasi penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir merupakan hasil dari akumulasi berbagai program tersebut diatasi. Tidak dapat diidentifikasi program atau kegiatan mana yang paling besar dampaknya atau dominan selama tahun 2011-2015. Semua program dan kegiatan yang ditujukan menanggulangi kemiskinan belum ada yang memperlihatkan hasil yang memuaskan, khususnya bagi masyarakat pesisir. Hal ini juga terkait dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.
6. Strategi pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir harus didasarkan atas potensi yang dimiliki dan mengatasi secara spesifik permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara : a) membantu menurunkan biaya dan beban hidup keluarga miskin, b) meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga, baik dari hasil tangkapan ikan maupun pengolahan dan pemasaran ikan, c) memperbaiki perilaku keluarga miskin agar tidak konsumtif dan mau menabung untuk masa depannya.
7. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memerlukan peraturan pemerintah untuk menjabarkan dan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan Di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga melalui peraturan atau keputusan Bupati dapat disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berdampak langsung kepada peningkatan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disusun beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dibutuhkan kajian lebih mendalam mengenai data kemiskinan di kawasan pesisir sehingga dapat mengetahui secara spesifik jumlah keluarga miskin (hidup di bawah garis kemiskinan) dan pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari nafkah. Hal ini membantu program pemerintah agar lebih fokus dan prioritas terhadap warga miskin di kawasan pesisir.
2. Diperlukan penjabaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan Di Kabupaten Sidoarjo agar upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan bagi masyarakat di wilayah pesisir mendapatkan payung hukum dalam pelaksanaannya.
3. Diperlukan penyusunan anggaran kegiatan penanggulangan kemiskinan yang lebih spesifik lokasi dan spesifik kegiatan bagi masyarakat di 10 desa pesisir tersebut. Sehingga diperlukan sebuah kajian yang lebih spesifik untuk mengetahui apa permasalahan dan kebutuhan masyarakat pesisir dan bagaimana strategi meningkatkan kualitas hidup mereka dalam lima atau sepuluh tahun yang akan datang.
4. Membantu dan mendukung keberadaan kelembagaan ekonomi di kawasan pesisir, dalam bentuk koperasi sebagai alternatif bagi keluarga nelayan dan petambak dalam mendapatkan dana pinjaman lunak.
5. Memfasilitasi kelompok pengolah dan pemasar olahan perikanan agar lebih maju, sehingga keluarga nelayan mampu mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil laut. Selain itu mendorong berkembangnya wisata pemancingan ikan tambak, ikan laut dan wisata alam lainnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
6. Meningkatkan pola kerjasama antara kelompok masyarakat yang ada dengan LSM dan perusahaan swasta (melalui CSR) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2015. Sidoarjo Dalam Angka, 2015. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Sidoarjo.
- , 2014. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sidoarjo. 2014. Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- , 2009. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.
- , 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan Di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo.

Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)

-----, 2014. Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014. Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Arta Kusumaningrum, 2013. Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah). *Agriekonomika*, ISSN 2301-9948 Volume 2, Nomor 1. Pasca Sarjana Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Hotman M. Siahaan, 2015. Profil Kemiskinan dan Nelayan Jawa Timur. Seminar Isu Strategis Aktual: Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Yang Berkelanjutan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Pesisir Jawa Timur.

I Wayan Mudana, 2013. Ideologi Nyegara Gunung: Sebuah Kajian Sosiokultural Kemiskinan Pada Masyarakat Pesisir Di Bali Utara. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 1, April 2013.

Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. LkiS. Yogyakarta.